

Sejarah Panjang Pendidikan Karakter di Indonesia Pada Era Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi

Abd. Mu'id Aris Shofa¹, Mifdal Zusron Alfaqi², M. Mujtaba Habibi³, Rista Ayu Mawarti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

abd.muid.fis@um.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perkembangan pendidikan karakter pada era proklamasi kemerdekaan, orde baru, sampai reformasi serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah library research atau kepustakaan, yakni metode penelitian yang diperoleh berdasarkan literatur atau kepustakaan dengan melakukan analisis terhadap fakta dan data dari sumber pustaka dan dokumen, sehingga menghasilkan suatu analisis yang mendalam. Secara sederhana langkah kerja penulisan sejarah yang digunakan, meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada era proklamasi kemerdekaan, pendidikan karakter bertujuan untuk membangun manusia susila yang arif bijaksana, demokratis, bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat, cinta terhadap tanah air, dan memiliki jiwa patriot yang tinggi. Pendidikan karakter di masa orde baru bertujuan untuk membentuk manusia pancasilais sebagai individu pembangunan yang bermutu, mandiri, dan dapat menangkal suatu ajaran atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di era reformasi tujuan pendidikan karakter ialah membentuk karakter atau watak untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat dan mulia sikap, perilaku dan perbuatannya. Persamaan pendidikan karakter di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai reformasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan sikap, perilaku, dan tindakan warga negara. Pada urusan pemerintahan keduanya digunakan sebagai landasan pembuatan dan pengambilan kebijakan dalam implementasi pendidikan karakter. Perbedaan pendidikan karakter dari proklamasi kemerdekaan sampai reformasi dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan terhadap kebijakan pendidikan karakter yang diambil.

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Era Proklamasi Kemerdekaan, Era Orde Baru, Era Reformasi

I. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di abad ke-21 dewasa ini merupakan manifestasi perkembangan pendidikan yang tumbuh dari pengalaman pada masa lampau. Pendidikan terus berkembang menyesuaikan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sudrajat (2010) mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangannya, pendidikan berbagai bangsa memiliki berbagai macam corak, ragam, serta spesialisasinya. Dilihat dari sejarah kehidupan manusia pendidikan merupakan kebutuhan yang hakiki bagi peradaban manusia.

Secara umum pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi pendahulu untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda. Corak pendidikan erat hubungannya dengan corak kehidupan, sehingga apabila corak kehidupan mengalami perubahan, maka corak pendidikan juga akan mengikutinya (Agung, 2012). Dengan demikian, pendidikan terus mengalami perkembangan dan akan berubah secara dinamis dari waktu ke waktu mengikuti perubahan corak manusia.



Sedangkan, pendidikan karakter menjadi prioritas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalmeri (2014) menjelaskan bahwa pendidikan karakter menjadi kunci untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat serta masa depan bangsa. Sebagai suatu usaha yang dilakukan dari seluruh dimensi kehidupan sosial, pendidikan karakter diharapkan dapat membantu pembentukan karakter secara optimal. Dalam pandangan kewarganegaraan, pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah ialah sarana paling strategis untuk mengembangkan sikap warga negara yang memiliki keadaban (*civility*).

Konsep pendidikan karakter ialah upaya bagaimana menciptakan iklim pendidikan yang menekankan pada pembangunan etika, memiliki rasa tanggung jawab, serta nilai-nilai positif yang berlaku secara universal (Berkowitz & Bier, 2005). Sedangkan, Akbar (2011) mengemukakan bahwa pendidikan karakter dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh negara dan aparaturnya untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai bangsa yang memiliki karakter mulia dan baik. Karakter mulia dan baik adalah perilaku dalam kehidupan sesama manusia, terhadap Tuhan, serta terhadap alam dan lingkungannya.

Pendidikan untuk membentuk moral (*moral building*) dan mengembangkan karakter (*character building*) dinilai dapat menjawab berbagai tantangan pendidikan dewasa ini, terlebih dengan kesadaran adanya

pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan baik dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Tantangan dalam pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh semakin berat. Pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek *transfer of knowledge* tetapi pendidikan juga harus mampu memberikan pada *transfer of value*.

Persoalan yang berkaitan dengan karakter dan moralitas bangsa Indonesia, seperti tawuran antara pemuda, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menggambarkan kondisi kebangkrutan moral yang sedang dihadapi. Lunturnya nilai karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berdampak besar pada kelangsungan masa depan peradaban suatu negara bangsa. Padahal, karakter yang kuat dan tangguh akan semakin memperkuat eksistensi suatu negara. Oleh karena itulah, maka pendidikan karakter mutlak diperlukan dan terus digelorkan untuk membangun generasi yang unggul (Shofa, 2012).

Pendidikan karakter di Indonesia sebagaimana tercantum dalam satuan pendidikan nasional dapat dimaknai menjadi dua hal penting, yakni (1) pendidikan karakter ialah penanaman nilai budaya dan karakter bagi generasi penerus bangsa dan (2) proses pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Sebagai warisan budaya, pendidikan karakter merupakan bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sartini (2004) mengemukakan secara umum budaya yang dimiliki oleh

suatu daerah atau bangsa dapat disebut kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Pendidikan karakter di Indonesia menghargai suatu lokalitas berupa nilai-nilai hidup yang diyakini dan diterapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pendidikan karakter membawa dampak yang relevan terhadap perkembangan hidup manusia. Dari generasi ke generasi pendidikan karakter lekat dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu pula dari segi historis, pendidikan karakter telah digelorakan oleh bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Sebagaimana pemerintah di awal kemerdekaan yang menggelorakan pembangunan watak dan karakter bangsa Indonesia sebagai suatu kesadaran patriotisme. Kemudian pada masa Orde Baru terdapat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang difungsikan untuk membentuk manusia yang Pancasila-lais. Sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pendidikan karakter dapat dikembangkan dalam ruang-ruang pendidikan formal dengan lebih terarah, berlaku secara universal, dan praktis. Oleh karena itu tulisan ini ingin mengkaji tentang perkembangan pendidikan karakter pada era proklamasi kemerdekaan, orde baru, sampai reformasi serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan library research, yakni penulisan berdasarkan literatur atau metode kepustakaan. Metode yang digunakan dalam analisis perkembangan pendidikan karakter di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah. Hariyono (1995) mengemukakan langkah-tahap-tahap penelitian sejarah, yaitu (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Pada tahap heuristik, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan arsip yang memuat tentang pendidikan karakter dan sejarah pendidikan di Indonesia. Perbedaan sumber-sumber kepustakaan akan diuji kebenarannya dengan melakukan verifikasi sumber, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sjamsudin (1996) menjelaskan bahwa kritik adalah metode sejarah terkait sumber, yang berfungsi sebagai filter secara kritis dan penilaian menyangkut orisinilitas dan kepercayaan terhadap sumber yang tersedia. Setelah melakukan verifikasi ialah interpretasi, yakni melakukan pemahaman mendalam pada buku-buku koran, jurnal, majalah, serta dokumen-dokumen yang mendukung pengkajian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya subjektivitas atas suatu pandangan tertentu. Pada tahap historiografi menekankan analisis secara kritis terhadap peristiwa, sehingga menghasilkan sintesis dari seluruh pengkajian yang telah dilakukan.

III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan Karakter di Era Proklamasi Kemerdekaan

Pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan (1945-1965) tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Transisi kebijakan pendidikan nasional pada periode ini dibagi menjadi tiga fase, yakni: fase pertama, era awal proklamasi kemerdekaan hingga terbentuknya UU Pendidikan No.4 Tahun 1950; fase kedua, akhir berlakunya UU Pendidikan 1950 hingga dikeluarkan Dekrit Presiden Tahun 1959; fase ketiga, berakhirnya Dekrit Presiden Tahun 1959 hingga awal demokrasi terpimpin (1965) yang selanjutnya disebut dengan Orde Lama (Assegaf, 2005).

a) Fase Awal Kemerdekaan (1945-1950); Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami banyak perubahan di segala aspek kehidupan, salah satunya adalah aspek pendidikan. Pada tanggal 19 Agustus 1945 pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara. Sebagai kebijakan awal di bidang pendidikan, Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan instruksi umum yang berisi upaya untuk menghilangkan sistem pendidikan kolonial warisan Belanda dan ingin lebih mengutamakan materi dan semangat patriotisme. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam (Moestoko, 1986) menyebutkan bahwa pendidikan harus mampu membangun semangat kebangsaan

dan patriotisme. Tidak menutup kemungkinan situasi awal kemerdekaan masih diselimuti oleh semangat revolusi, sehingga sistem pendidikan nasional pada saat itu difokuskan pada upaya perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial.

Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) mengusulkan pembaharuan di sektor pendidikan dan pengajaran kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Terdapat tiga tuntutan pokok-pokok pembaharuan, yakni (1) paham perseorangan (individualisme) yang hingga kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan dan perikemanusiaan yang tinggi, (2) sesuai dengan dasar keadilan sosial semua sekolah harus terbuka untuk tiap penduduk negara termasuk laki-laki atau perempuan, (3) pengajaran kesehatan dan olah raga hendaklah teratur sehingga membentuk kecerdasan rakyat yang harmonis (Djojonegoro, 1996). Menjawab tuntutan tersebut, maka pemerintah membentuk panitia penyidik pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja dengan tugas merencanakan susunan baru dari berbagai macam sekolah dan menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang kebutuhan yang praktis dan tidak terlalu berat. Assegaf (2005) menjelaskan pasca dibentuk panitia penyidik pengajaran, diadakan Kongres Pendidikan Indonesia di Solo (1947) dan Kongres Pendidikan di Yogyakarta (1949) yang menghasilkan

lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP), yang kemudian dijadikan sebagai landasan yuridis pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran nasional. Sebagai konsekuensi adanya perubahan sistem pendidikan yang lebih terarah, pemerintah berupaya mengubah kurikulum yang semula berlandaskan pada kepentingan kolonial menjadi selaras dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang merdeka. Gunawan (1986) menyebutkan bahwa kurikulum pada masa itu disebut dengan 'Rencana Pelajaran 1947'. Rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikan sekolah memperhatikan beberapa hal, yakni (1) mengurangi materi yang berfokus pada aspek hafalan, (2) materi pembelajaran berbasis pada kehidupan, (3), meningkatkan pendidikan watak atau karakter, (4) meningkatkan pendidikan olahraga, dan (5) meningkatkan kesadaran bela negara. Pada masa awal kemerdekaan ini, rencana pelajaran lebih berorientasi pada pembangunan watak atau karakter dan kesadaran terhadap nilai-nilai praktis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keberadaan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan dan pengajaran nasional pada periode 1945-1950 banyak mengadopsi pemikiran Ki Hadjar Dewantara sebagai penggagas konsep pendidikan di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara telah merintis konsep pendidikan karakter yang berhasil

diterapkan di Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Konsep pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara dilakukan melalui sistem among, yang berarti membimbing anak dengan penuh kecintaan dan mendahulukan kepentingan sang anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya (Soeratman, 1985). Sedangkan, Ahmadi (1987) menjelaskan bahwa konsep pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara memuat tiga pedoman, luhur, yakni ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Tiga pedoman inilah yang diaktualisasikan dalam pendidikan karakter di awal kemerdekaan. Bahkan, menurut Ki Hadjar Dewantara (2004) terdapat enam pilar karakter bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur, seperti memberi contoh (woorbeeld); pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming), pengajaran (wulang-wuruk, leering); perintah, paksaan dan hukuman; laku; serta pengalaman batin yang mencakup ngerti, ngroso, nglakoni (mengerti, merasa, dan melakukan)..

b) Fase Demokrasi Liberal (1950-1959); Memasuki tahun 1950 diawali dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah ditandatangani pada 2 November 1949. Kepemimpinan RIS masih berada di bawah kendali Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Perubahan bentuk negara berdampak pada hal-hal yang bersifat fundamental, sehingga muncul

gerakan sosial masyarakat yang berupaya merongrong kekuasaan RIS. Serangan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), petualangan Kapten Andi Azis, gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS), hingga upaya Belanda menduduki kembali wilayah Indonesia, menjadi bukti kondisi RIS pada saat itu belum stabil. Tidak hanya itu, RIS juga berdampak pada masalah ekonomi, militer, kependudukan, dan pendidikan.

Di bidang pendidikan, terjadinya gejolak sosial politik memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang dapat mempengaruhi berjalannya sistem pendidikan nasional yang tidak optimal. Sjamsuddin (1993) mencatat permasalahan pendidikan di masa demokrasi liberal ialah masih banyak rakyat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Selain itu, Kemdikbud (1986) juga mencatat terjadinya perubahan kabinet selama tujuh kali selama pemerintahan RIS juga berkaitan dengan proses berjalannya sistem pendidikan nasional. Umur dari setiap kabinet yang pendek menunjukkan tidak semua Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan kebijakan baru. Kemungkinan kebijakan menteri hanya meneruskan kebijakan menteri sebelumnya, bahkan suatu kabinet tidak memberikan akses informasi programnya untuk publik. Sehingga,

selama mengalami beberapa kali pergantian kabinet kebijakan pendidikan nasional pada masa demokrasi liberal tidak berjalan dengan penuh kebaruan.

Sjamsuddin (1993) menyatakan bahwa menjawab tantangan pendidikan, pemerintah masa demokrasi liberal berupaya untuk membangun infrastruktur, memperbanyak akses penyelenggaraan sekolah rakyat, melakukan integrasi sekolah-sekolah RIS ke dalam sistem pendidikan Indonesia, dan merumuskan dasar kebijakan perundang-undangan nasional sebagai prioritas pemerintah. Berkaitan dengan pengelolaan kebijakan nasional di bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pemerintah melalui Kementerian PP dan K mengeluarkan inspeksi ketentuan perubahan sekolah-sekolah yang awalnya mengikuti model Belanda di wilayah bekas RIS mengikuti sistem pendidikan nasional. Kebijakan lain yang lebih teknis ialah memperbaiki tingkatan pendidikan formal, mengembangkan kualitas calon guru, dan pengaturan pendidikan tinggi.

Menunjang terselenggaranya pendidikan formal, pemerintah di masa demokrasi liberal membuat kebijakan baru terkait penyempurnaan kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum baru ini dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Wahyuni (2018) menjelaskan bahwa yang menonjol dari Kurikulum 1952



ini ialah setiap materi yang di ajarkan haruslah dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selain itu bahwa pendidikan di masa demokrasi liberal berorientasi pada ideologi dan nasionalisme yang tidak hanya menjadi jargon dan semangat kebijakan pendidikan nasional saja, namun diupayakan dan dipraktekkan dalam ruang akademik dan masyarakat. Kebebasan demokrasi dan sikap nasionalisme dalam pendidikan inilah, yang kemudian menjelma menjadi bagian dari model, strategi, dan metode-metode pembelajaran yang berbasis pada nilai karakter.

- c) Fase Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Pada periode ini, Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sekaligus menjadi tonggak awal pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin (Assegaf, 2005). Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam pandangan politik dianggap memperkuat posisi presiden dan memperlemah peranan partai politik pada masa itu. Pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 yang menguraikan konsep ideologi demokrasi terpimpin menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan (Riklefs, 2005). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang ditegaskan dalam pidato Soekarno pada 17 Agustus 1959 merupakan instrumen atas berlakunya Manifesto Politik (Manipol) dianggap membawa perubahan yang fundamental di berbagai sektor kehidupan bernegara sekaligus

berupaya menjawab kegagalan pemerintahan terkait stabilitas politik di masa demokrasi liberal (1951-1959). Keberadaan Manifesto Politik (Manipol) dalam sistem pemerintahan Indonesia tentu berpengaruh terhadap berjalannya sistem pendidikan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni (1) Manipol dinilai sebagai indoktrinasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk pada jenjang pendidikan formal, dan (2) kebijakan pendidikan nasional berazaskan Pancasila dan Manipol USDEK. Tujuan pendidikan nasional pada periode demokrasi terpimpin ialah untuk melahirkan warga negara Indonesia yang berjiwa susila, bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur dari segi spiritual maupun material, serta berjiwa Pancasila. Menindaklanjuti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang disusul dengan pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 mengenai konsep Manifestasi politik (Manipol), Kementerian PP dan K merumuskan langkah-langkah strategis yang segera dilaksanakan dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Muda PP dan K No.1/1959 tentang Sapta Usaha Tama. Instruksi tersebut berisi tujuh poin penting untuk menunjang keberlangsungan pendidikan nasional, (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K, (2) menggiatkan kesenian dan olah raga, (3) mengharuskan "usaha halaman", (4) mengharuskan penabungan, (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6)

mengadakan "klas masyarakat", (7) membentuk "regu kerja" di kalangan SLA dan universitas (Kemdikbud, 1986).

Terkait dengan pengaturan kebijakan nasional di bidang pendidikan berikutnya, pemerintah di era demokrasi terpimpin mengeluarkan Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama. Kebijakan tersebut dikemukakan bahwa pendidikan harus bertujuan sebagai (1) sarana atau ruang untuk membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia, (2) penghasil tenaga kerja yang terampil di semua bidang dan tingkatan kerja, (3) pengembangan kebudayaan nasional, (4) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (5) lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat (Tilaar, 1995). Sebagai kelanjutan dari Sapta Usaha Tama serta untuk memberikan dasar-dasar pendidikan nasional yang sesuai dengan haluan negara, Menteri PP dan K yang dipimpin oleh Dr. Prijono mengeluarkan Instruksi No.2 pada tanggal 10 Oktober 1960 tentang Sistem Pendidikan Panca Wardhana. Instruksi Menteri PP dan K No. 2 ini memuat prinsip-prinsip pendidikan sebagai (a) wadah menanamkan rasa cinta bangsa dan tanah air; (b) meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional; (c) mengembangkan jiwa artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan; dan (e) peningkatan

kesehatan jasmani atau fisik. Sejak saat itu seluruh kegiatan pembelajaran baik yang kurikuler maupun yang ekstrakurikuler banyak berubah dan harus menyesuaikan dengan intruksi di atas. Berdasarkan segi materi pelajaran, Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan mulai dari tingkat rendah sampai dengan perguruan tinggi.

Keberadaan pendidikan karakter pada periode ini tidak secara implisit berdiri sebagai suatu sistem pendidikan, namun terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. Pembangunan nilai-nilai pendidikan karakter yang dikejar dalam prinsip-prinsip Panca Wardhana ialah membentuk manusia Indonesia yang memiliki: (1) kepribadian dan karakter kebudayaan Indonesia; (2) semangat patriotisme dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara; (3) berdasar pada nilai-nilai Pancasila; (4) memiliki jiwa gotong royong; (5) memiliki jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia susila dan berbudi luhur; (7) kesadaran yang bersahaja dan mengutamakan kejujuran; (8) kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11) mengenal asas demokrasi terpimpin; (12) mengenal asas ekonomi terpimpin; (13) berdisiplin; (14) memiliki kepandaian untuk menghargai waktu; (15) cara berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja untuk membangun dengan bekerja keras (Assegaf, 2005).;

b. Pendidikan Karakter di Era Orde Baru

Berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin, maka tongkat estafet dilanjutkan dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Peralihan kekuasaan dari Orde Lama menjadi Orde Baru membawa dampak di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, namun juga perubahan di bidang pendidikan. Selama periode Orde Baru, pemerintah memiliki program kerja yang dikenal dengan Pembangunan Jangka Panjang (PJP I) yang memfokuskan perhatian pada kebijakan pendidikan nasional meliputi empat tahap strategi politik, yakni menghilangkan kekuatan politik dari pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ideologi marxisme dari kehidupan masyarakat serta membersihkan semua lembaga dan kekuatan sosial politik dari pengaruh Nasakom, selain itu upaya yang dilakukan oleh rezim orde baru ialah mengkonsolidasi pemerintahan supaya terjaga stabilitasnya dan upaya pemurnian azas Pancasila dan UUD 1945, dan terakhir menghapuskan atau menghilangkan dualisme kepemimpinan nasional, mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan pembangunan nasional.

Menurut Kemdikbud (1986) lahirnya Orde Baru maka dasar, tujuan, dan isi pendidikan nasional dipertegas kembali sebagai berikut: (a) dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila; (b) tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti

yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945; (c) isi pendidikan adalah (1) mempertinggi mental moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, (2) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, dan (3) membina pengembangan fisik yang kuat dan sehat. Pada masa Orde Baru dibuatlah Kurikulum 1968 sebagai pembaharuan atas Kurikulum 1964 yang sarat dengan Manipol USDEK. Pelaksanaan pendidikan nasional secara murni dan konsekuen didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan karakter bagi warga negara juga menjadi perhatian pemerintah di masa Orde Baru. Hartono (2017) mengemukakan bahwa pembangunan karakter bangsa secara eksplisit dimuat dalam politik tertinggi lembaga negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berupa Ketetapan No.IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Lampiran GBHN Tahun 1973 menyebutkan bahwa untuk mencapai cita-cita nasional, maka kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari Tanak Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Pemberian mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila di ruang-ruang pendidikan formal pada awal Orde Baru ialah pondasi untuk membentuk karakter kewarganegaraan secara menyeluruh.

Selanjutnya, upaya pembangunan karakter bangsa diwujudkan melalui TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(Ekaprasetya Pancakarsa) atau lebih dikenal dengan nama P4. Menindaklanjuti TAP MPR No.II/MPR/1978 tersebut pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.10 Tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia Mengenai Hasil-Hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978 (Anggono dalam Hartono, 2017). Penyelenggaraan penataran P-4 ini menasar kepada masyarakat umum dan pegawai negeri di seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat pendidikan formal, P-4 terintegrasi melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pertama kali diatur dalam Kurikulum 1975.

Kendati demikian, adanya integrasi P-4 dalam PMP dianggap menimbulkan masalah. Samsuri (2014) menjelaskan bahwa kurikulum PMP tahun 1975 tidak luput dari beban misi P-4 dan dinilai bersifat politis. Hal ini disebabkan materi penataran P-4 untuk pegawai negeri sipil dengan masyarakat umum dibuat seragam, begitupun dengan materi P-4 di sekolah yang terintegrasi pada PMP. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Darji Darmodiharjo (1982) mengemukakan dua alasan utama atas penyeragaman tersebut, yakni (1) materi penataran P-4 untuk PNS pada hakekatnya sama dengan materi PMP untuk siswa, karena keduanya sama-sama warga negara Republik Indonesia, dan (2) akan timbul ancaman yang berbahaya jika materi untuk kedua kelompok tersebut berbeda. Pemerintah menilai tidak perlu adanya pembeda penetapan P-4 sebagai instrumen pembangunan karakter bangsa. Besar kemungkinan adanya Kurikulum 1975

yang menekankan tujuan pendidikan lebih efektif dan efisien, sehingga kebijakan dibuat dengan praktis. Berdasarkan kebijakan tersebut dapat disimpulkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) adalah penataran P-4 yang menasar pada jenjang pendidikan formal, sedangkan penataran P-4 itu sendiri menasar pada masyarakat luas termasuk pegawai negeri.

Dianggap masih memiliki kekurangan atas penerapan P-4, pemerintah pada tahun 1983 berusaha mengoptimalkan penataran P-4 yang harus diikuti oleh setiap siswa baru di sekolah seluruh wilayah Indonesia. Penataran P-4 dianggap sebagai proses indoktrinasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, bahkan masyarakat umum. Penataran P-4 berisi tentang butir-butir pengamalan Pancasila yang terdiri dari 36 butir, sekaligus dijadikan standar kemampuan seseorang dalam menguasai pemahaman Pancasila.

Sejak berlakunya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan pendidikan nasional dari tahun 1973 hingga 1998, pembangunan karakter bangsa di sisipkan ke dalam mata pelajaran di jenjang pendidikan seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan P4, pada akhirnya bermuara kepada model kebijakan pendidikan yang bersifat top down (Samsuri, 2012). Artinya, muncul pandangan bahwa kategori warga negara yang baik merupakan standarisasi negara terlebih dengan berlakunya Pancasila

sebagai asas tunggal. Warga negara secara tidak langsung dipaksa untuk memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dikategorisasikan oleh negara, sehingga warga negara tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk menentukan pilihan hidupnya.

Materi P-4 dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila terus dikokohkan pada Kurikulum 1984. Kemudian, dengan dibuatnya Kurikulum 1994 materi P-4 semakin diperjelas arahnya dengan kehadiran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menurut Kepmendikbud Tahun 1993 dalam (Samsuri, 2012) PPKn dianggap sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, warga negara dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dari berbagai kritik dan keterbatasannya, pembangunan karakter dalam pendidikan masa Orde Baru mulai terstruktur. Materi pelajaran P-4 yang dulunya bersifat verbalistik dan hanya dapat diserap dengan mengandalkan kognitif/hafalan, perlahan-lahan semakin dapat ditingkatkan variasinya sesuai dengan nilai-nilai praktek di kehidupan sehari-hari.

c. Pendidikan Karakter di Era Reformasi

Kemunduran pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan adanya

perubahan mendasar atas segala aspek kehidupan, reformasi dinilai sebagai tonggak kelanjutan pemerintahan yang lebih baik. Di bidang pendidikan, kebijakan reformasi perlu memperhatikan berbagai persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk manajemen, perencanaan, sampai praksis pendidikan ditingkat mikro (Suyanto, 2000). Pendidikan pada masa reformasi harus mengalami perbaikan, terarah serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa di masa yang akan datang. Di era reformasi ini, dunia pendidikan perlu difungsikan sebagai wadah atau ruang untuk mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing dalam persaingan global.

Pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 yang selama Orde Baru digunakan sebagai instrumen pembangunan karakter bangsa, menjadi salah satu alasan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Wacana atas pembangunan watak dan karakter untuk merevitalisasi kehormatan bangsa telah memenuhi ruang publik sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pengalaman historis membuktikan perubahan-perubahan yang secara drastis, cepat dan berjangka panjang dalam kehidupan politik pada saatnya dapat menimbulkan disorientasi sosial dan kultural, maka penting untuk memunculkan wacana dan harapan perlunya pembangunan kembali karakter bangsa (Azra, 2006).

Menunjang keberlangsungan pendidikan nasional pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai landasan yuridis atas pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang berbunyi "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Tahun 2010 dikatakan sebagai tahun pendidikan karakter karena sejak tahun 2010 tepatnya pada tanggal 12 Januari 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan program "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" sebagai gerakan nasional.

Pendidikan karakter adalah sebuah cara untuk menggembleng generasi muda agar memiliki jiwa ksatria, pantang menyerah, unggul, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Sejarah perjuangan kebangsaan kita mencatat, bahwa kemerdekaan yang kita raih merupakan hasil jerih payah para

pendahulu kita yang memiliki karakter tangguh, ulet, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Kita ingin melahirkan insan Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan karakter, kita ingin mencetak manusia Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi. Melalui pendidikan karakter pula, kita ingin membangun bangsa yang unggul. Bangsa yang memiliki daya saing dan etos kerja produktif (www.presidentri.go.id).

Selain itu momentum penguatan pendidikan karakter di era reformasi semakin mendapatkan posisi yang bagus dan strategis disaat pemerintah melalui kementerian menggulirkan program penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam peningkatan karakter masyarakat indonesia khususnya pemuda dunia pendidikan diharapkan mampu meningkatkan tidak hanya olah pikir (literasi) tetapi juga olah hati (etik dan spiritual) olah rasa (estetik) dan juga olah raga (kinestetik). Diharapkan dunia akademik mampu menerapkan keempat dimensi pendidikan agar upaya penanaman nilai karakter mampu di wujudkan.

Karakter identik dengan kepribadian manusia. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik atau gaya, sifat khas dari seseorang yang di bentuk dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana manusia itu tinggal (Sadirman, 2010). Dalam konteks mikro, karakter secara koheren akan memancar dari hasil olah pikir, olah hati olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang. Karakter merupakan ciri khas seseorang yang mengandung nilai, kemampuan,



kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Sedang secara makro, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa sekelompok orang yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan norma-norma UUD 1945, keberagaman dan komitmen terhadap NKRI. Dari penjelasan ini bisa dimaknai bahwa karakter tidak hanya semata-mata karena pembawaan sifat manusia, tetapi memerlukan program pembinaan untuk membentuk karakter yang baik dan mulia.

Pendidikan karakter merupakan peluang dan harapan bagi bangsa dan negara sebagai upaya penyempurnaan jati diri manusia. Pendidikan karakter harus mampu dimaknai sebagai upaya pendewasaan dan pematangan jati diri seseorang agar menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berkarakter dan mempunyai akhlak mulia, sehingga dalam sikap perilaku dan perbuatan mampu menunjukkan manifestasi dari pribadi yang unggul, baik terhadap sesama manusia, Tuhan dan alam sekitarnya. Sedangkan menurut Sadirman (2010) pendidikan karakter atau pendidikan moral merupakan proses pembinaan, pembudayaan, dan pemanusiaan. Pendidikan karakter akan mengantarkan warga negara mampu menggali potensi yang dimilikinya sehingga dapat menjadi insan-insan yang beradab, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Menurut Alki (dalam Sadirman, 2010) dalam konteks ke-Indonesiaan, pendidikan karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa (Indonesia) untuk melahirkan insan atau warga Negara yang bermartabat dan berperadaban tinggi. Karakter bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung perekat cultural bagi setiap warga Negara. Karakter bangsa menyangkut perilaku yang mengandung core value dan nilai-nilai yang berakar pada filosofi Pancasila dan norma UUD 1945 serta simbol-simbol keindonesiaan seperti: Sang Saka Merah Putih, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Lambang Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya.

Program pemerintah mengenai "Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa" tersirat sebagai upaya rekayasa sosial untuk mewujudkan generasi Indonesia yang ber-KeTuhanan YME, berkemanusiaan, berjiwa persatuan, berorientasi kerakyatan dan berkeadilan sosial, melahirkan generasi yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berakhlak mulia, demokrasi dan bertanggung jawab, generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual serta keterampilan kinestetik.

d. Persamaan dan Perbedaan Pendidikan Karakter Sejak Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi

Perkembangan bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi tentu mengalami dinamika sosial yang panjang. Masing-masing periode memiliki tantangan yang beragam. Di

bidang pendidikan, dinamika sosial politik membawa dampak yang cukup mendasar. Berbagai kebijakan pemerintah, berupa perangkat hukum, kurikulum di bidang pendidikan pun juga ikut mengalami perubahan. Kendati demikian, pendidikan karakter dari awal kemerdekaan sampai reformasi masih dipertahankan untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang unggul. Berikut ialah tabel karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi.

Periode Pemerintahan	Karakteristik Kebijakan Pendidikan Karakter
Awal kemerdekaan (1945-1950)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan masih diwarnai semangat revolusi atas upaya panjang merebut kemerdekaan - Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dijadikan dasar pendidikan nasional - Pendidikan karakter belum berdiri sendiri, namun terintegrasi menjadi cita-cita nasional - Karakter bangsa yang dicita-citakan mengadopsi gagasan Ki Hadjar Dewantara yang dinamai enam pilar karakter, yakni: memberi contoh (<i>woorbeeld</i>); pembiasaan (<i>pakulinan</i>); pengajaran (<i>wulang wuruk</i>); perintah, paksaan dan hukuman; laku; pengalaman lahir batin yang mencakup mengetahui (<i>ngerti</i>), merasa (<i>ngroso</i>), melakukan (<i>nglakoni</i>). - Esensi pendidikan karakter secara tersirat mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada semangat cinta tanah air (<i>patriotisme</i>) dan jiwa kepahlawanan - Pelaksanaan pendidikan mengacu pada kurikulum yang disebut Rencana Pelajaran 1947 atau <i>leer plan</i>
Demokrasi Liberal (1950-1959)	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi sosial politik yang tidak stabil yang ditandai dengan perubahan struktur pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) berpengaruh terhadap berjalannya pendidikan yang tidak optimal - Pancasila dijadikan sebagai falsafah bangsa dan dasar pendidikan nasional, meski UUD 1945 telah diganti oleh UUDS 1950 - Pengembangan pendidikan memfokuskan diri pada mengatasi problem pada saat itu dan membangun pondasi yang kokoh untuk menyesuaikan diri pada bentuk pemerintahan yang baru - Pendidikan nasional berupaya untuk membangun identitas dan karakter yang telah dibangun di awal kemerdekaan, serta menekankan diri pada nasionalisme dan demokrasi

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan mengacu pada Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang memerhatikan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari
Demokrasi Terpimpin (1960-1965)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dianggap bersifat politis, ditandai oleh berlakunya asas pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manifestasi Politik (Manipol) USDEK - Pendidikan karakter belum berdiri sendiri, namun terintegrasi dalam Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana yang salah satunya mengusahakan sistem pendidikan baru yang menunjang perkembangan moral nasional - Pelaksanaan pendidikan mengacu pada Rencana Pendidikan 1964 yang didalamnya menekankan prinsip-prinsip pendidikan dinamakan Pancawardhana, yaitu: (1) kepribadian dan kebudayaan Indonesia; (2) semangat patriot komplet, paripurna; (3) berbas Pancasila; (4) bersemangat gotong royong; (5) memiliki jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia susila dan berbudi luhur; (7) kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran; (8) kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11) mengenal asas demokrasi terpimpin; (12) mengenal asas ekonomi terpimpin; (13) berdisiplin; (14) memiliki kepedaiaan untuk menghargai waktu; (15) cara berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja untuk membangun dengan bekerja keras
Orde Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan diarahkan sebagai agenda pembangunan bangsa - Mengacu pada Kurikulum 1968 yang menekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama - Pendidikan karakter masih terintegrasi dalam penataran P-4, yang kemudian masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)
Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> - Landasan pendidikan nasional tercantum dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 - Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan watak. Pembangunan watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Berdasarkan tabel karakteristik perkembangan pendidikan karakter di Indonesia dapat dilihat bahwa pendidikan karakter dari awal kemerdekaan sampai reformasi masih mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar sistem pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan berjalannya pendidikan karakter masih menyesuaikan nilai-nilai praktis kehidupan masyarakat Indonesia yang telah dikristalkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan Pancasila dan UUD 1945 masih sangat relevan dalam pembangunan watak dan karakter manusia Indonesia.

Perkembangan pendidikan karakter dari awal kemerdekaan sampai reformasi membawa corak yang beragam. Keragaman corak tersebut didasarkan atas kebutuhan suatu bangsa menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Perubahan sistem pemerintahan dari masa ke masa menawarkan adanya gagasan-gagasan baru mengenai konsep pendidikan nasional, termasuk wacana pembangunan watak atau karakter bangsa. Pendidikan karakter pada awal kemerdekaan masih bersifat konseptual, namun di era reformasi telah berdiri sendiri masuk dalam setiap mata pelajaran, serta menjadi salah satu aspek penting pengembangan kompetensi peserta didik. Artinya, pendidikan karakter membawa arah pendidikan yang tidak hanya mengacu pada kemampuan kognitif, namun afektif, psikomotor, dan spiritual.

IV. KESIMPULAN

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai dua hal penting, yakni (1) sebagai pewarisan budaya dan karakter bagi generasi muda, (2) proses pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan pendidikan karakter di Indonesia bersifat dinamis. Dari fase awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi pendidikan karakter digunakan sebagai wahana pembangunan watak atau karakter bangsa agar menjadi warga negara yang unggul. Pendidikan karakter di awal kemerdekaan sampai reformasi memiliki kesamaan karakteristik, yakni dilandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai landasan sikap, perilaku, dan dasar pengambilan kebijakan nasional.

Perbedaan pendidikan karakter sejak awal kemerdekaan sampai reformasi dipengaruhi oleh aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Di awal kemerdekaan (1945-1950), karena masih diselimuti semangat revolusi, pendidikan karakter terintegrasi pada cita-cita nasional dan fokus pada pembangunan karakter warga negara yang memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme. Di masa demokrasi liberal (1950-1959) pendidikan karakter bertujuan ideologis untuk meningkatkan kebebasan demokrasi



dan nasionalisme. Sedangkan, pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) pendidikan karakter dilandaskan pada Pancasila dan Manifestasi Politik (Manipol) USDEK serta menjunjung tinggi prinsip Pancawardhana yang terdiri dari (a) cinta bangsa dan tanah air, moral national/ internasional/ keagamaan; (b) perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan; (e) perkembangan jasmani.

Pada masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal, sehingga pendidikan dilandaskan pada Pancasila secara konsekuen. Pendidikan karakter merupakan agenda nasional yang terintegrasi dalam penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). P-4 terdiri dari 36 butir yang menysasar pada seluruh elemen masyarakat. Di tingkat sekolah P-4 masuk ke dalam mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Pendidikan karakter masa reformasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendati demikian, berlakunya UU Sistem Pendidikan Nasional tetap didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan karakter pada masa reformasi telah mampu berdiri sendiri

dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran di sekolah. Pendidikan nasional diarahkan pada pembangunan karakter peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Leo & Suparman, T. 2012. Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Ombak.
- Ahmadi, A. 1987. Pendidikan Dari Masa ke Masa. Bandung: Armico.
- Akbar, Sa'dun. 2011. Revitalisasi Pendidikan karakter di Sekolah Dasar. Makalah disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM, Malang, 8 Juni.
- Ary H. Gunawan. (1986). Kebijakan-kebijakan pendidikan di indonesia. Jakarta: Bina Aksara
- Assegaf, Abd, R. 2005. Politik Pendidikan Nasional. Jakarta: Kurnia Salam.
- Asian Brain, 2012. Artikel Pendidikan: hal.1, (Online), (<http://www.anneahira.com/pengetahuan-pendidikan.htm>), diakses tanggal 1 Juli 2020.
- Azra, Azyumardi, 1999b, "Pembinaan Pendidikan Akhlak Didik pada Era Reformasi", Makalah disajikan dalam Seminar tentang Pendidikan Anak dalam Indonesia Baru, Direktorat Pembinaan Pendidikan Islam pada Sekolah Umum, Depag RI, Jakarta, 2 Nopember 1999. (Online),



- (<http://www.erlangga>), diakses 17 November 2012.
- Berkowitz & Bier, Melinda. 2005. *What Works in Character Education: A research-driven guid for Educators*. Washington: CEP.
- Dalmeri. 2014. Pendidikan untuk Pengembangan Karakter (Telaah Terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam *Educating for Character*), *Jurnal Al-Ulum* 14 (1).
- Djojonegoro, Wardiman. 1996. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Hadi, N. 2010. Tinjauan Kritis Tentang Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS. FIS UM, Malang, 5 Desember 2010.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hidayatullah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Ki Hajar Dewantara. (2004). *Bagian pertama pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa Pengembangan Pendidikan
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Pidato Presiden pada Hari Pramuka tanggal 14 Agustus 2010. (online). (<http://www.presidentri.go.id/index.php/pidato/html>). Diakses 20 November 2012.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Pidato Presiden pada Hari Pramuka tanggal 14 Agustus 2010. (online).
- Pusat Kurikulum. 2010a. *Bahan Pelatihan: Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai*
- Riklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Sadirman. 2010. *Antara Pendidikan Karakter dan Pendidikan IPS*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS. FIS UM, Malang, 5 Desember 2010.
- Samsuri. 2014. "Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: dari Politik Rezim ke Politik Negara untuk Membangun Warga Negara Ideal" Makalah disajikan dalam Seminar Nasional tentang Menyongsong Kurikulum Nasional, Pengurus Pusat IKAPI, Aula Perpustakaan Nasional Jakarta, 29 Oktober 2012. (Online), <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300167/pengabdian/kurikulum-ppkn-dari-politik-rezim-ke-politik-negara-untuk-membangun-warga-negara-ideal-makalah-ikapi-.pdf>, diakses 4 Juli 2020.
- Sartini. 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*. *Jurnal Filsafat*, 37(2).
- Shofa, Abd. Mu'id Aris. 2012. *Pendidikan Karakter di Sekolah Sejak Proklamasi Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, *Jurnal Pendidikan*

- Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang 1(1).
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S.H. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sjamsuddin, Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan (1993). Sejarah pendidikan di Indonesia zaman kemerdekaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Sjamsudin, H. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Somarsono Moestoko. (1986). Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman. Balai Pustaka: Jakarta.
- Subkhan, Edi. 2018. Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965), *Journal of Indonesian History* 7(1), (Online), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>, diakses tanggal 3 Juli 2020.
- Sudrajat, Akhmad. 2010. Pengembangan Karakter.(online), (<http://akhmad.wordpress.com/pengembangan-karakter>) diakses tanggal 1 Juli 2020.
- Suradi, et.al. 1986. Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan.Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Suyanto, dkk. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Undang-undang RI No. 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (Online), (<http://www.jdih.bpk.go.id>), diakses 12 September 2012.
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (Online), (<http://www.jdih.bpk.go.id>), diakses 12 September 2012
- Wahyuni, Fitri. 2015. Kurikulum dari Masa ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Al-Adabiya*, 10(2).